

## BAB II

### KONSEP UMUM MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK PESANTREN

#### A. Tinjauan Manajemen

Banyak literasi yang menjelaskan mengenai manajemen baik secara etimologis maupun bahasa. Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa latin “*manus*” berarti tangan sedangkan dalam bahasa Inggris “*to manage*” artinya mengatur.<sup>13</sup> Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan yang hendak dicapai atau diinginkan oleh sebuah organisasi.<sup>14</sup>

George R. Terry mendefinisikan manajemen sebagai proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengaktifan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya.<sup>15</sup>

Manajemen mulai muncul pada pertengahan abad ke 19 pada negara industri. Mereka mulai menyadari bahwa perlunya pengaturan dalam bisnis meliputi kegiatan produksi, marketing

---

<sup>13</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

<sup>14</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 1.

<sup>15</sup> Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 1.

dan lain-lain. Pada perkembangannya, manajemen (red: konvensional) mulai melalui tahap perbaikan dan penyempurnaan. Sedangkan, dalam Islam manajemen muncul sejak Allah menurunkan perintah kepada Nabi Muhammad SAW melalui nash-nash Al-Qur'an dan hadits. Manajemen dalam Islam memiliki asas kemanusiaan sebagai pembawa mandat sebagai agama pembawa rahmat bagi semua makhluk di muka bumi (*rahmatan lil alamin*).

Manajemen Islam (syariah) dalam manajemen yang tidak bebas nilai, karena manajemen syariah tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia, tetapi juga berorientasi di akhirat nanti (nanti disana), yang hanya bisa dipahami dalam sistem kepercayaan agama Islam.<sup>16</sup> Berikut ayat Al Qur'an yang menjadi landasan kegiatan manajemen dalam Islam:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُم بَنِينَ

مَرَّضُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.* (QS. Ash-Shaff: 4)<sup>17</sup>

Kokoh yang disebutkan dalam ayat Al Qur'an diatas menunjukkan bahwa harus adanya sinergisitas antara komponen

---

<sup>16</sup> Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012, h. 2.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya.

satu dengan yang lainnya sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan rencana. Sedangkan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad mengatakan:

*“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, dan teratur)”* (HR. Thabrani).

Itqan diatas maksudnya arah/tujuan pekerjaan itu jelas, landasannya mantap, dan cara mendapatkannya transparan. Itu merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT.<sup>18</sup>

Dalam manajemen Islam terdapat dua unsur penting, yakni subjek dan objek. Subjek adalah pelaku/manajer dan objek merupakan tindakan manajemen yang didalamnya memuat organisasi, sumber daya manusia, operasi/produksi, pemasaran dan lain-lain.

Berbicara mengenai manajemen Islam tidak terlepas dari perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai religiusitas. Keimanan dan ketauhidan seseorang akan memvisualisasikan berbagai tindakan yang akan dilakukan. Jika seseorang memiliki iman yang kuat maka tidak akan terjadi perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menjangkit oleh para pemimpin di Indonesia saat ini.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 14

Setidaknya terdapat empat pokok fungsi manajemen yang perlu diterapkan dalam sebuah organisasi yakni, *planning, organizing, actuating, and controlling*.

1. Perencanaan (*Planning*)

Salah satu fungsi penting dalam manajemen yaitu perencanaan (*planning*). Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia (*human resources*), sumber daya alam (*natural resources*), dan sumber daya lainnya (*others resources*) untuk mencapai tujuan.<sup>19</sup>

Perencanaan dalam persepsi manajemen Islami (berbasis syariah) adalah suatu keniscayaan dan merupakan kegiatan dari suatu organisasi, instansi maupun bisnis yang bertugas memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan agar mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal.<sup>20</sup>

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan mengenai perencanaan sebagai berikut:

*“Jika engkau ingin mengerjakan suatu pekerjaan, pikirkanlah akibatnya. Jika perbuatan baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, tinggalkanlah.”* (HR. Ibnu Mubarak).

---

<sup>19</sup> Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, h. 42.

<sup>20</sup> Abdullah, *Manajemen...*, h. 141

Suatu perencanaan adalah suatu aktivitas integratif yang berusaha memaksimalkan efektifitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan definisi tersebut, perencanaan minimum mempunyai tiga karakteristik berikut:

- a. Perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang.
- b. Terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi, yaitu serangkaian tindakan dimasa yang akan datang dan akan diambil oleh perencana.
- c. Masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi serta organisasi merupakan unsur yang paling penting dalam proses perencanaan.<sup>21</sup>

Perencanaan yang baik membutuhkan persyaratan atau kelayakan (*visibility*). Sule OT dan Syaifullah, K yang dikutip Abdurrahman mengemukakan bahwa perencanaan mempunyai persyaratan sebagai berikut :

- a. Faktual atau realistis, artinya segala hal yang dirumuskan perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi perusahaan.
- b. Logis dan rasional, artinya apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal sehingga perencanaan tersebut dapat dijalankan.

---

<sup>21</sup> Siswanto, *Pengantar...*, h. 42.

- c. Fleksibel, artinya tidak kaku, sesuai dengan perubahan yang terjadi.
  - d. Komitmen, artinya dapat dibangun dan melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk bersama-sama mewujudkan tujuan organisasi.
  - e. Komprehensif, artinya menyeluruh dan mengakomodasikan aspek-aspek yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan perusahaan.<sup>22</sup>
2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam bahasa yang sederhana organisasi dapat diartikan sebagai interaksi antara orang-orang yang ada dalam suatu wadah untuk melakukan sesuatu atau berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian dapat diketahui indikator organisasi adalah: ada orang-orang yang bekerjasama, ada kegiatan pekerjaan yang dilakukan bersama/terkoordinir, dan ada tujuan bersama yang ingin dicapai.<sup>23</sup>

Pengorganisasian dapat dilakukan dengan membagi *job description* kepada masing-masing element. *Job description* tersebut akan menjelaskan bagaimana tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab yang akan diemban agar dapat berjalan bersama tanpa bersinggungan dengan yang lainnya.

---

<sup>22</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, h.57.

<sup>23</sup> Abdullah, *Manajemen...*, h.177.

Pengorganisasian berarti menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan antar bagian-bagian antar satu sama lain dipengaruhi oleh seluruh bagian struktur tersebut. Pada pengorganisasian bertujuan untuk membagi kerja-kerja besar menjadi skala kecil. Hal ini mempermudah manajer untuk melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan.<sup>24</sup>

Dalam perspektif Islam keorganisasian sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang bersabda :

*“Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan (tepat, terarah, dan tuntas)”*. HR. Thabrani

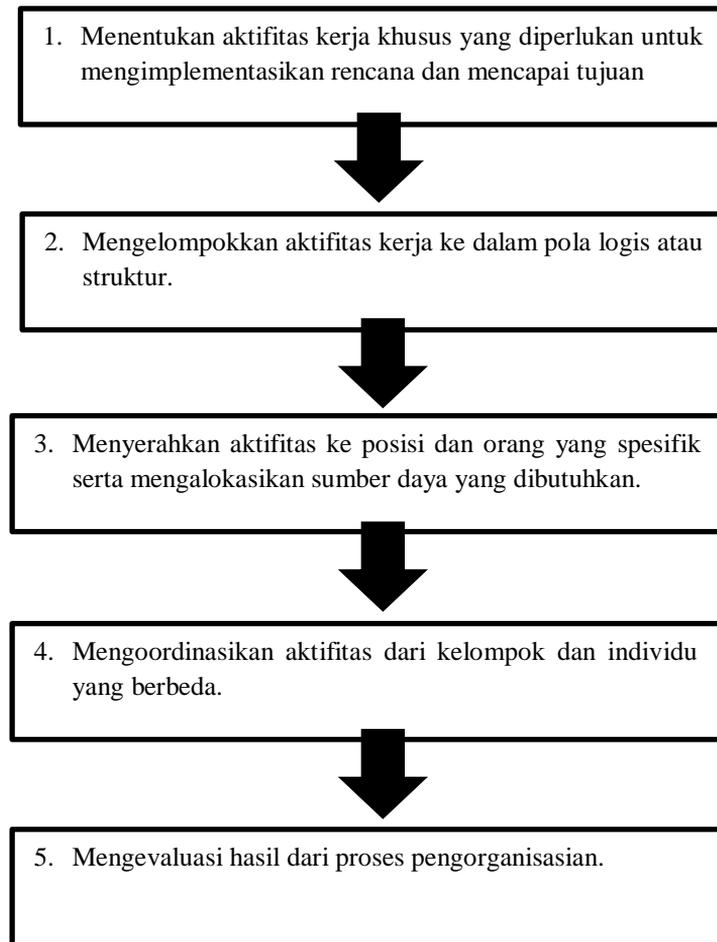
Boone dan Kurtz sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman menggambarkan langkah-langkah dalam proses pengorganisasian, yaitu sebagai berikut :<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Veitzal, dkk, *Islamic...*, h. 149.

<sup>25</sup> Abdurrahman, *Manajemen...*, h. 75-76.

Gambar 2.1  
Langkah-langkah Pengorganisasian



### 3. *Actuating*

*Actuating* adalah tahap pelaksanaan. Tahap ini sama pentingnya dengan perencanaan. Sebuah perencanaan dikatakan berhasil apabila pelaksanaannya juga berjalan

sesuai dengan tujuan. Untuk melaksanakan tugas-tugas dari bagian pelaksanaan juga membutuhkan orang-orang yang tepat dan kapabel dalam bidangnya. Agar hasil dari pelaksanaan akan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam proses pendelegasian kepada tugas masing-masing membutuhkan pola komunikasi yang baik. Koordinasi antara *planner* dan *actuator* perlu dijalin dalam rangka menyamakan persepsi antara rencana dan pelaksanaannya. Komunikasi yang baik ini pada gilirannya akan meminimalisir kesalahpahaman yang dapat mengganggu jalannya organisasi.

Ada sejumlah aspek yang harus diperhatikan dan didayagunakan oleh pemimpin untuk berhasil dalam menggerakkan organisasi. Aspek-aspek tersebut meliputi<sup>26</sup>:

a. Perilaku

Perilaku yang dimaksud adalah perilaku organisasi (*organizational behavior*- OB). Dengan memahami apa yang menyebabkan karyawan berperilaku tertentu, para pemimpin dapat mendayagunakan perilaku tersebut untuk mencapai hasil yang positif. Misalnya, perilaku kewarganegaraan organisasi (*organizational citizenship*) adalah perilaku kerja yang melebihi keperluan-keperluan pekerjaan dan memberikan kontribusi sesuai kebutuhan untuk keberhasilan

---

<sup>26</sup> Abdullah, Manajemen..., h. 209-

organisasi.<sup>27</sup> Karyawan dengan perilaku seperti ini biasanya suka memberikan bantuan kepada karyawan lain, pelanggan bahkan mengerjakan pekerjaan jika perlu. Perilaku ini dapat dipertahankan dan diberdayakan dengan menghargai secara adil terhadap kerja dan pengorbanan karyawan.

Kemudian yang harus dipahami terdapat beberapa sikap (*attitude*) seseorang yang mempengaruhi perilakunya. Sikap disini yang dimaksud yaitu sebuah evaluasi kognitif dan afektif yang pada awalnya mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu.<sup>28</sup> sikap seseorang memiliki komponen-komponen: kognitif (pikiran), afektif (perasaan), dan perilaku.

- 1) Komponen kognitif dari sebuah sikap meliputi kepercayaan: seperti pengetahuan seseorang tentang tanggungjawab terhadap pekerjaannya, opini-opini mengenai kemampuan personal.
- 2) Komponen afektif menyangkut emosi atau perasaan seseorang mengenai objek dari sikap, seperti menikmati atau membenci suatu pekerjaan.

---

<sup>27</sup> Richard L. Daft, *Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2003, H. 259

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 211

- 3) Komponen perilaku dari sikap adalah maksud dengan tujuan seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu pada objek dan sikap<sup>29</sup>

Ketiga komponen diatas menjadi pertimbangan pemimpin untuk diperhatikan. Jika karyawan sudah mempunyai pemahaman komponen kognitifnya, maka harus dibangun komponen afektifnya dengan mengkonstruksikan *sense of belonging* (mencintai pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya), lalu mewujudkannya menjadi sikap motoriknya (perilaku) sesuai dengan yang diinginkan.

#### b. Kepemimpinan

Dalam bahasa manajemen, kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuannya. Terdapat banyak tipe kepemimpinan, dipilih berdasarkan situasi dan kondisinya. Diantara gaya kepemimpinan yang dapat dipilih oleh seorang pemimpin sebagai berikut:

- 1) Gaya otoriter, yakni gaya pemimpin yang cenderung memusatkan otoritas dengan mengandalkan kekuasaan yang sah, penghargaan dan kosisif.
- 2) Gaya demokratis, adalah gaya seorang pemimpin yang mendelegasikan otoritas untuk orang lain, mendorong adanya partisipasi, dan mengandalkan

---

<sup>29</sup> Abdullah, *Manajemen...*, h. 212

kekuasaan ahli serta kekuasaan pengacu untuk mengatur para bawahannya.

- 3) Gaya situasional, merupakan gaya seorang pemimpin yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya.
- 4) Gaya suportif, yakni gaya seorang pemimpin yang menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan dan kebutuhan para bawahan.
- 5) Gaya direktif, yaitu gaya seorang pemimpin yang mengarahkan atau memberitahu para bawahannya tentang apa yang harus mereka kerjakan, meliputi: perencanaan, jadwal kegiatan, penentuan tujuan, standar perilaku, serta tujuan, serta pemahaman pada ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>30</sup>

Kalau kita mempelajari kepemimpinan Muhammad SAW, maka kita akan menemukan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Rasulullah dalam memimpin pengikutnya adalah ia menjalankan tugas kepemimpinan itu dengan “teladan” yang bisa langsung dilihat dan dirasakan oleh pengikutnya, dengan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 214-215

mengedepankan lima substansi nilai-nilai kebersamaan.<sup>31</sup>  
diantaranya:

- 1) Integritas pribadi.
- 2) Perbaikan hubungan dengan orang lain.
- 3) Daya kepemimpinan.
- 4) Perilaku etis (*akhlaqul karimah*).
- 5) Peningkatan semangat melalui pengetahuan spiritual.

c. Motivasi

Motivasi dalam definisi dalam bahasa Indonesia merujuk pada pengertian kekuatan-kekuatan internal dan eksternal yang ada dari seseorang yang membangkitkan antusiasme (semangat) untuk melakukan sesuatu. Motivasi yang ada dalam diri karyawan apabila diberdayakan akan dapat memacu pada produktivitas karyawan.

Dalam praktek manajemen ternyata untuk membangkitkan dan mendayagunakan motivasi itu perlu mempelajari teori kebutuhan manusia. Salah satu diantaranya adalah secara psikologis adalah rasa ingin dihargai (penghargaan) atas segala usaha dan prestasi kerjanya. Penghargaan ini ada dua tipe yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Penghargaan intrinsik adalah kepuasan

---

<sup>31</sup> Ismail Noor, *Kepemimpinan Muhammad SAW* (Edisi Bahasa Indonesia), Bandung: Mizan, 2011, h. 82.

yang diterima seseorang dalam proses melakukan sesuatu tindakan (pekerjaan), yang berdampak pada kinerja (keberhasilan). Misalnya, seseorang merasa puas karena berhasil membuat peralatan (media) pembelajaran dengan baik. Sedangkan penghargaan ekstrinsik adalah penghargaan yang diberikan oleh orang lain misalnya penghargaan yang diberikan oleh direktur perusahaan kepada manajer pemasaran atas prestasi dan keberhasilannya mampu mendongkrak volume produksi yang dapat dipasarkan. Kedua jenis penghargaan ini harus sama diperhatikan agar saling menunjang. Kalau hanya satu saja yang diperhatikan maka motivasi kerja tidak akan berkembang dengan baik. Apalagi kalau keduanya tidak diperhatikan, maka organisasi akan sepi dari kreatifitas.<sup>32</sup>

d. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan: *Pertama*, membangun hubungan antar sesama manusia. *Kedua*, melalui pertukaran informasi. *Ketiga*, untuk menguatkan dengan perilaku orang lain. *Keempat*, berusaha merubah sikap dan perilaku itu.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Abdullah, *Manajemen...*, h. 224

<sup>33</sup> Booh, *1980 dalam Cangara*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009, h. 19.

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang menjadi pilar untuk menggerakkan karyawan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Karena dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi, sebagian besar dihabiskan melalui komunikasi antara satu sama lain. Sehingga, perlu menjaga komunikasi dengan baik agar tercipta kondisi kerja yang kondusif dan sesuai dengan tujuan.

e. Kerja sama

Salah satu cara untuk menggerakkan karyawan adalah dengan membangun kerjasama (*team work*) atau tim. Tim adalah salah satu unit yang terdiri dari dua orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasikan kerja mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Rumusan ini memiliki tiga komponen. *Pertama*, diperlukan orang untuk bekerjasama dua orang atau lebih. *Kedua*, orang-orang di dalam tim tersebut memiliki interaksi regular (terjadwal). *Ketiga*, orang-orang dalam tim itu mempunyai tujuan kinerja yang sama. Walaupun tim itu terdiri dari sekelompok orang, tetapi tim itu berbeda dengan kelompok.<sup>34</sup>

4. Pengawasan (*Controlling*)

*Controlling* merupakan salah satu yang terpenting dalam manajemen. Walaupun pendelegasian

---

<sup>34</sup> Abdullah, *Manajemen...*, h. 237.

adalah hal yang mutlak dalam organisasi, tetapi pendelegasian bukan berarti menyerahkan urusan tanpa kendali.<sup>35</sup> Dalam proses pelaksanaannya tentu harus dilakukan pengawasan agar tidak menyimpang dan tepat pada rencana semula.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan hak. Pengawasan dalam Islam terbagi menjadi dua hal berikut:<sup>36</sup>

*Pertama*, control yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, ia akan bertindak hati-hati. Dalam Al Qur'an menyebutkan (QS Al Mujadilah (7): 58.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط  
يَكُونُ مِنْ جُودَى ثَلَاثَةً إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا  
هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ  
أَيْنَ مَا كَانُوا ط ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ج إِنَّ اللَّهَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٨﴾

---

<sup>35</sup> Veithzal, *Islamic...*, h. 151.

<sup>36</sup> Abdurrahman, *Manajemen...*, h. 135-136

*Artinya: Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apayang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang ke enamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian, Dia akan memberitahu kepada mereka pada hari Kiamat apa yang telah mereka kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*<sup>37</sup>

*Kedua*, pengawasan lebih lanjut akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.

Pada bagian pengawasan ini hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai apresiasi terhadap pencapaian menggunakan system *reward* dan *punishment*. Jika karyawan bekerja dengan baik maka harus diberikan *reward* yang pantas. Sebaliknya jika karyawan melakukan kesalahan harus diberikan peringatan agar tidak ada kesalahan yang berulang. Sistem ini penting diterapkan karena akan dapat memunculkan semangat atau etos kerja yang tinggi.

---

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya.

Karena pada tahap ini, segala prestasi akan diberikan penghargaan meskipun kecil. Sehingga karyawan merasa dihargai. Semangat itulah yang akan muncul ketika bekerja yang mendorong kinerja karyawan yang semakin baik.

## **B. Pesantren dan Ruang Lingkupnya**

Peran pesantren sejak dulu memang tidak pernah lepas dengan peran edukatif yang murni mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Pesantren dengan label pendidikan agama yang diemban, diharapkan akan berkontribusi penting dalam pembenahan ‘kemiskinan spiritual’ masyarakat. Kurikulum pesantren menawarkan kajian yang sangat penting yang tidak hanya terbatas pada bagaimana membangun relasi dengan Tuhan, namun juga relasi dengan sesama manusia maupun lingkungan. Penyajian pelajaran dibangun berdasarkan pada kekhasan budaya Indonesia yang sangat kental dengan nuansa kekeluargaan. Tipe penyajian pelajarannya sangat sederhana. Para santri menimba ilmu dengan *bandongan* atau *wetonan* dan *sorogan*.<sup>38</sup> Pesantren berasal dari kata pe-santri-an. Santri adalah mereka yang mempelajari agama islam. Istilah pesantren disebut dengan surau

---

<sup>38</sup> Ismail SM, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, h. 53.

di daerah Minangkabau, Penyantren di Madura, pondok di Jawa Barat, dan Rangkang di Aceh.<sup>39</sup>

Pesantren, atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional tertua di Indonesia. Menurut para ahli, lembaga pendidikan ini sudah ada sebelum Islam datang ke Indonesia. Oleh karena itu, namanya berasal dari dua bahasa asing yang berbeda. Pondok berasal dari kata *Funduq* yang berarti tempat menginap atau asrama, sedangkan pesantren dengan awalan pe- dan akhiran -an, berasal dari kata santri, bahasa Tamil yang berarti penuntut ilmu atau diartikan juga guru mengaji.<sup>40</sup>

Gus Dur mengatakan Pesantren adalah sebuah kehidupan yang unik, sebagaimana dapat disimpulkan dari gambaran lahiriahnya. Pesantren adalah sebuah kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehidupan sekitarnya. Dalam kompleks itu berdiri beberapa buah bangunan: rumah kediaman pengasuh (di daerah berbahasa Jawa disebut *kyai*, di daerah berbahasa Sunda *ajengan*, dan di daerah berbahasa Madura *nun* atau *bendara*, disingkat *ra*); sebuah surau atau masjid, tempat pengajaran diberikan (bahasa Arab *madrasah*, yang juga lebih mengandung konotasi sekolah); dan asrama tempat tinggal para

---

<sup>39</sup> Khoirudin Bashori, *Problem Psikologi Kaum Santri*, Yogyakarta: FKBA, 2003, h. 76.

<sup>40</sup> Mohammad Daud Ali, Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995, h. 145.

siswa pesantren (*santri*, pengambilalihan dari bahasa Sansekerta dengan perubahan pengertian).<sup>41</sup>

Jika ditelisik mengenai sejarah pesantren di Indonesia akan sangat panjang. Sistem pendidikan pesantren mulai muncul bersamaan dengan awal penyebaran agama Islam di Indonesia. Sebelum tahun 1960-an pusat-pusat pendidikan pesantren masih dikenal dengan nama pondok. Pondok yang dimaksud adalah asrama-asrama yang menjadi tempat tinggal santri terbuat dari bambu, atau dalam bahasa Arab, *funduq* yang artinya hotel.

Dalam sebuah pondok pesantren memiliki lima elemen dasar tradisi pesantren, sebagai berikut:

#### 1. Pondok

Pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional dimana siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang guru atau lebih dikenal dengan kyai. Asrama yang ada dalam kompleks pesantren dimana kyai menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruangan untuk belajar dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Kompleks pesantren juga biasanya dikelilingi oleh tembok-tembok yang mengitari pesantren

---

<sup>41</sup> Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2010, h. 4.

untuk mengawasi keluar dan masuknya santri sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>42</sup>

Pondok atau asrama menjadi ciri khas tradisi pesantren yang tidak dimiliki oleh sistem pendidikan tradisional negara lain. Dalam pesantren biasanya memiliki ciri-ciri pondok pesantren, yaitu:

- a. Adanya hubungan yang akrab antara murid (para santri) dengan kyai. Hal ini disebabkan karena mereka tinggal dalam satu pondok.
- b. Tunduknya santri kepada kyai. Para santri menganggap bahwa menentang kyai selain dianggap tidak sopan juga bertentangan dengan ajaran agama.
- c. Hidup hemat dan sederhana benar-benar dilakukan dalam kehidupan pesantren
- d. Semangat kemandirian diterapkan . misalnya santri mencuci pakaiannya sendiri, membersihkan kamar tidurnya sendiri bahkan ada yang memasak makanan sendiri.
- e. Disiplin sangat ditekankan dalam kehidupan di lingkungan pondok pesantren.
- f. Berani menderita untuk mencapai sesuatu tujuan yang merupakan salah satu pendidikan yang diperoleh di pesantren.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Zamahkhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2015, h. 79

Pondok atau asrama yang dihuni oleh santri-santri merupakan salah satu pilar utama sebuah pondok pesantren. Salah satu bagian dari tradisi pesantren yang dituntut untuk berkembang. Meskipun keadaan masih sederhana, sempit dan penuh sesak. Namun biasanya santri yang berasal dari pedesaan tidak menjadi penghalang yang berarti untuk tetap belajar di pesantren. Di sisi yang lain, santri yang baru datang yang berasal dari kota biasanya mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan lingkungan pesantren.

Sebagian besar Pesantren di Jawa bergantung pada banyaknya santri yang mondok. Misalnya, dalam pembangunan biasanya santri dimintai iuran pembangunan guna membangun gedung-gedung pesantren. Upaya itu tentu untuk kemajuan pesantren. Selain iuran santri, biasanya terdapat sumbangan-sumbangan dari masyarakat secara sukarela.

Asrama sebagai tempat penginapan santri dan difungsikan untuk mengulang kembali pelajaran yang disampaikan oleh kyai atau ustadz. Saefuddin Zuhri menegaskan bahwa pondok bukanlah asrama atau internat. Jika asrama telah disiapkan bangunannya sebelum calon penghuninya datang. Sedang pondok justru didirikan atas dasar gotong royong dari santri yang telah belajar di

---

<sup>43</sup> Mustajab, *Masa Depan Pesantren: Telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf*, Yogyakarta: LKiS, 2015

pesantren. Implikasinya adalah bahwa jika asrama dibangun dari kalangan berada dengan persiapan dan persediaan dana yang relatif memadai, maka pondok dibangun dari kalangan rakyat jelata yang serba kekurangan bahkan kepepet secara keuangan.<sup>44</sup>

Terdapat tiga alasan utama mengapa sebuah pesantren perlu untuk menyediakan asrama untuk santri, diantaranya:

- a. Kemasyhuran seorang kyai dan kedalaman ilmu pengetahuan tentang Islam menarik santri-santri dari tempat-tempat yang jauh untuk berdatangan. Untuk dapat menggali ilmu dari kyai tersebut secara teratur dan dalam waktu yang lama, para santri harus meninggalkan kampung halaman dan menetap di dekat kediaman kyai dalam waktu yang lama.
- b. Hampir semua pesantren berada di desa-desa. Tidak ada model kos-kosan di desa seperti yang ada di kota-kota Indonesia. Pada umumnya juga tidak tersedia perumahan (akomodasi) yang cukup untuk menampung para santri. Dengan demikian, perlu adanya asrama khusus bagi para santri.
- c. Terdapat sikap timbal balik antara kyai dan santri, dimana para santri menganggap kyainya seolah-olah sebagai bapaknya sendiri, sedangkan kyai menganggap para santri

---

<sup>44</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Intitusi*, Jakarta: Erlangga, 2006, h. 21.

sebagai titipan Tuhan yang harus senantiasa dilindungi. Sikap timbal balik menimbulkan keakraban dan kebutuhan untuk saling berdekatan terus menerus. Sikap ini menimbulkan perasaan tanggung jawab di pihak kyai untuk dapat menyediakan tempat tinggal para santri. Disamping itu, dari pihak santri tumbuh perasaan pengabdian kepada kyainya, sebagai sumber tenaga bagi kepentingan pesantren dan keluarga kyai.<sup>45</sup>

Pentingnya pondok pesantren sebagai asrama para santri bergantung pada jumlah santri yang berasal dari daerah-daerah yang jauh. Bagi pesantren yang masih terbilang kecil, biasanya santri tinggal di rumah-rumah masyarakat sekitar. Mereka menggunakan pesantren hanya untuk keperluan-keperluan tertentu, misalnya mengaji atau sholat.<sup>46</sup>

Pondok atau asrama bagi santri adalah salah satu pilar utama pesantren. Selain bagian dari tradisi pesantren, pondok menjadi penentu dari perkembangan dan kemajuan peradaban pesantren. Sehingga, seberapa besar sebuah pesantren juga ditentukan dari bangunan atau pondok yang menampung para santri.

## 2. Kyai

Sebagaimana telah disinggung diatas mengenai relasi unik antara kyai dan santri menunjukkan bahwa kehadiran

---

<sup>45</sup> Dhofier, *Tradisi...*, h. 83.

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 84.

kyai merupakan salah satu daya tarik bagi santri dan masyarakat. Kedalaman ilmu kyai menjadi salah satu faktor penentu bagi pertumbuhan sebuah pesantren. Selain itu kyai menjadi nahkoda bagi arah dan jalan yang akan ditempuh oleh pesantren.

Syarat dalam tradisi pesantren yaitu seorang kyai-  
ulama adalah pemegang ilmu-ilmu agama doktrinal. Tugas ini tidak dapat dilimpahkan kepada masyarakat umum, karena berhubungan dengan kepercayaan bahwa ulama merupakan pewaris Nabi.<sup>47</sup>

Menurut asal-usulnya, perkataan kyai dipakai untuk ketiga jenis gelar yang saling berbeda:

- a. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, misalnya, “Kyai Garuda Kencana” dipakai untuk sebutan kereta emas yang ada di keraton Yogyakarta.
- b. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.
- c. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajarkan kitab-kitab Islam klasik kepada santrinya. Selain gelar kyai, ia juga sering disebut seorang alim (orang yang dalam pengetahuan Islamnya).<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Halim (eds), *Manajemen...*, h. 223-224.

<sup>48</sup> Dhofier, *Tradisi...*, h. 93

Sebutan “alim” dalam masyarakat bangsa kita menunjukkan bahwa seorang guru, kyai atau ulama mengajarkan sikap-sikap agama yang bukan sekedar teori, tetapi juga contoh, amalan, dan suri tauladan. Sang kyai menjadi pembimbing para santri selama 24 jam sehari. Sehingga santri menyaksikan sendiri di depan matanya contoh-contoh yang baik dari gurunya kemudian secara langsung – tanpa instruksi atau paksaan – mengikuti sendiri amalan-amalan yang baik itu. Jadi, kehidupan sehari-hari amalan beserta sikap sang kyai lalu menjadi pedoman, dan bukan sekedar retorika. Sang kyai menjadi cermin dimana sang santri mengamati karakter idealnya. Dan karakter ke-alim-an yang paling tinggi di mata orang-orang pesantren adalah sikap ikhlas dan wara.<sup>49</sup>

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjelaskan dalam bukunya bahwa seorang kyai dengan para pembantunya merupakan hierarki kekuasaan satu-satunya secara eksplisit diakui dalam lingkungan pesantren. Ditegakkan di atas kewibawaan moral sang kyai sebagai penyelamat para santrinya dari kemungkinan melangkah ke arah kesesatan, kekuasaan ini memiliki perwatakan yang absolut. Hierarki intern ini, yang sama sekali tidak mau berbagi tempat dengan kekuasaan dari luar dalam aspek-aspeknya yang paling

---

<sup>49</sup> Ahmad Baso, *Pesantren Studies 2a: Kosmopolitanisme Peradaban Kaum Santri di Masa Kolonial*, Jakarta: Pustaka Afid, 2013, h.56.

sederhana pun, juga membedakan kehidupan pesantren dari kehidupan umum di sekitarnya. Demikian besar kekuasaan seorang kyai atas diri santrinya sehingga si santri untuk seumur hidupnya akan senantiasa terikat dengan kyainya, minimal sebagai sumber inspirasi dan sebagai penunjang moral dalam kehidupan pribadinya. Dalam urusan memilih jodoh, membagi harta pusaka dengan sesama ahli warisnya, bahkan dalam menentukan lapangan pekerjaan pun, seorang santri merasakan kewajiban moral untuk berkonsultasi dan mengikuti petunjuk-petunjuk kyai.<sup>50</sup>

Daya hidup sebuah pesantren bergantung pada kapasitas kyai yang memimpinnya dan kesadaran serta tanggung jawab keturunannya sebagai penerusnya. Perkembangan dunia pesantren tidak lepas dari tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang baik dan berkualitas. Sebab salah satu tujuan dari pesantren adalah mencetak generasi yang memiliki ilmu pengetahuan dan agama yang memiliki akhlaqul karimah. Sebuah jawaban dari keresahan-keresahan masyarakat mengenai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan budaya-budaya barat yang dapat merusak generasi muda dan cita-cita bangsa.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Wahid, *Tradisi...*, h. 9.

<sup>51</sup> Darban, "Kiai dan Politik pada Zaman Kerajaan Islam", dalam majalah Pesantren, V, No. 2, 1988, h. 34.

Meskipun kebanyakan kyai tinggal di daerah pedesaan, mereka merupakan bagian dari kelompok elit dalam struktur sosial, politik dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebab, sebagai suatu kelompok, para kyai memiliki pengaruh yang amat kuat di masyarakat, merupakan kekuatan penting dalam kehidupan politik di Indonesia. Kebanyakan mereka memiliki sawah yang cukup namun tidak perlu tenggelam dalam pekerjaan sawah. Mereka bukan petani, namun pemimpin dan pengajar yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat. Dan, untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan penganjur Islam (*preacher*) dengan baik, mereka perlu memahami kehidupan politik. Mereka dianggap dan menganggap diri memiliki suatu posisi dan kedudukan yang menonjol baik tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian, mereka merupakan pembuat keputusan yang efektif dalam sistem kehidupan sosial tidak hanya dalam kehidupan keagamaan tetapi soal-soal politik. Profesi mereka sebagai pengajar dan penganjur Islam membuahkan pengaruh yang meliputi batas-batas desa (bahkan kabupaten) di mana pesantren mereka berada.<sup>52</sup>

Muhammad Idris Jauhari juga berpendapat bahwa kyai atau pimpinan pesantren tidak saja berfungsi sebagai *leader*, *central figure*, dan *top manager* di pesantrennya masing-masing, tetapi juga sebagai *moral force* bagi santri dan seluruh

---

<sup>52</sup> Dhofier, *Tradisi...*, h. 94.

penghuni pesantren dimana antara santri dan kyai tercipta hubungan batin (bukan sekedar emosional) yang tulus dan kokoh, bahkan sampai ketika mereka sudah pulang ke masyarakat. Suatu kondisi yang seharusnya terdapat dalam lembaga pendidikan apapun, tetapi sangat jarang ditemukan – kalau tidak akan disebut tidak ada – dalam sistem-sistem pendidikan lainnya.<sup>53</sup>

Untuk menjadi seorang kyai, seseorang harus berusaha keras melalui jenjang yang bertahap. Pertama, ia biasanya merupakan anggota keluarga kyai. Setelah menyelesaikan pelajarannya di berbagai pesantren, kyai pembimbingnya yang terakhir melatihnya mendirikan pesantrennya sendiri. Seringkali kyai pembimbing turut secara langsung dalam pendirian proyek pesantren baru, sebab kyai muda dianggap mempunyai potensi untuk menjadi seorang alim yang baik dan berfungsi sebagai penyaji santri senior.<sup>54</sup>

Masyarakat biasanya mengharapkan seorang kyai dapat menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan praktis sesuai dengan kedalaman ilmu yang dimilikinya. Semakin tinggi kitab-kitab yang diajarkan, ia akan semakin dikagumi. Ia juga diharapkan dapat menunjukkan kepemimpinannya, kepercayaannya kepada diri sendiri dan kemampuannya, karena banyak orang datang untuk meminta nasehat dan

---

<sup>53</sup> Umiarso, Nur Zazin. *Pesantren di Tengah Arus Mutu Pendidikan*, Semarang: RaSAIL, 2011, h. 24

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 97.

bimbingan dalam banyak hal. Ia juga diharapkan untuk rendah hati, menghormati semua orang tanpa melihat tinggi – rendah kelas sosialnya, kekayaan dan pendidikannya, banyak prihatin dan penuh pengabdian kepada Tuhan dan tidak pernah berhenti memberikan kepemimpinan keagamaan, seperti memimpin sembahyang lima waktu, memberikan khutbah Jum'at dan menerima undangan perkawinan, kematian dan lain-lain.<sup>55</sup>

Amin Haedari dalam bukunya mengatakan bahwa kyai merupakan aktor penggerak pembangunan rakyat, diantaranya:

- a. Sebagai agen dakwah.
- b. Mediator sosialisasi program pemerintah kepada rakyat kecil.
- c. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) umat yang berlandaskan IMTAQ dan IPTEK.
- d. Mengkampanyekan pembangunan spiritualitas.<sup>56</sup>

### 3. Masjid

Zamakhshari Dhofier mengatakan bahwa Masjid merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari pesantren dan tempat yang dianggap paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktik ibadah sholat

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 99.

<sup>56</sup> Amin Haedari, *Panorama Pesantren Dalam Cakrawala Modern*, Jakarta: Diva Pustaka, 2005, h. 106.

jamaah lima waktu, khotbah dan sholat jum'at serta pengajaran kitab-kitab Islam klasik.

Masjid secara harfiah berarti tempat sujud, karena ditempat ini setidaknya seorang muslim melaksanakan sholat lima waktu. Meskipun demikian, fungsi masjid bukan hanya tempat shalat, tetapi juga sebagai tempat berlangsungnya pendidikan dan kegiatan sosial kemasyarakatan.<sup>57</sup>

Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional. Dengan kata lain, kesinambungan sistem pendidikan Islam yang berpusat pada masjid sejak masjid Qubba didirikan dekat madinah pada masa Nabi Muhammad SAW tetap terpancar dalam sistem pesantren. Sejak zaman Nabi, masjid telah menjadi pusat pendidikan Islam. Dimana pun kaum muslimin berada, mereka selalu menggunakan masjid sebagai pusat pertemuan, pusat pendidikan, aktifitas administrasi dan kultural. Hal ini telah berlangsung selama 13 abad. Bahkan pada zaman sekarang pun di daerah dimana umat Islam belum begitu terpengaruh oleh kehidupan Barat, kita temukan para ulama yang penuh pengabdian mengajar murid-murid di masjid, serta memberi wejangan dan anjuran kepada murid-murid

---

<sup>57</sup>M. Chabib Chirzin, "Agama Ilmu dan Pesantren," dalam M. Dawam Rahardjo (ed), *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES, 1988, h. 92.

tersebut untuk meneruskan tradisi yang terbentuk sejak zaman permulaan Islam itu.<sup>58</sup>

Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa masjid penting dalam dunia pesantren. Pertama, masjid dalam tradisi kepesantrenan berusaha mengikuti tradisi yang dipraktikkan Nabi sebagai pusat aktivitas keagamaan dan sosial kaum muslim. Kedua, masjid sebagai simbol eksistensi kaum Muslim. Ketiga, masjid berfungsi sebagai “*a bridge*” (jembatan) antara ajaran agama yang dijelaskan melalui kitab-kitab kuning dan santri merupakan target pengajaran.<sup>59</sup>

Masjid yang pada awalnya memiliki dwifungsi, sebagai tempat ibadah dan lembaga pendidikan pada perkembangannya juga digunakan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Di kalangan pesantren, masjid menjadi bagian tradisi pesantren yang menjadi pondasi utama yang penting dan akan terus dipelihara.

#### 4. Santri

Santri adalah siswa yang tinggal di pesantren, guna menyerahkan diri. Ini merupakan persyaratan mutlak untuk memungkinkan dirinya menjadi anak didik kyai dalam arti sepenuhnya. Dengan kata lain, ia harus memperoleh kerelaan sang kyai dengan mengikuti segenap kehendaknya dan juga melayani segenap tugas kehormatan yang merupakan ukuran

---

<sup>58</sup> Dhofier, *Tradisi...*, h. 86.

<sup>59</sup> Syamsuddin Arief, *Jaringan Pesantren di Sulawesi Selatan*, Jakarta: Badan Litbang dan Dilkat Depag RI, 2008, h. 86

penyerahan diri itu. Kerelaan kyai ini, yang dikenal di pesantren dengan nama barakah, adalah alasan tempat berpijak santri di dalam menuntut ilmu dengan pada kebutuhan memperoleh kerelaan kali inilah diciptakan mekanisme konsensus dalam pembentukan tata nilai di pesantren. Status seorang santri di pesantren, dengan demikian memiliki fungsi sebagai medium guna menciptakan ketundukan pada tata nilai yang berlaku di pesantren itu sendiri. Oleh karena itu, tidaklah tepat untuk menggunakan istilah *drop out* bagi para santri yang tidak menyelesaikan pelajaran di pesantren dan tidak mampu mendirikan pesantren sendiri. Selama ia dapat diolah menjadi manusia yang tunduk pada tata nilai yang berlaku di pesantren – tempatnya dahulu belajar, dengan harapan ia akan mampu berpegang pada tata nilai itu di dalam hidupnya di masyarakat luas nanti – ia dianggap telah menjadi santri yang baik.<sup>60</sup>

Salah satu elemen penting dalam sebuah pesantren yakni santri. Maka perlu diketahui bahwa, dalam tradisi pesantren, santri terdiri dari dua:

a. Santri Mukim

Yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. Santri mukim yang paling lama tinggal di pesantren biasanya merupakan satu kelompok tersendiri yang memang bertanggung jawab

---

<sup>60</sup> Wahid, *Menggerakkan...*, h. 21-22

mengurusi kepentingan pesantren sehari-hari; mereka juga memikul tanggung jawab mengajar santri-santri muda tentang kitab-kitab dasar dan menengah.

b. Santri kalong

Merupakan murid-murid yang berasal dari desa-desa di sekitar pesantren, biasanya tidak menetap dalam pesantren. Untuk mengikuti pelajarannya di pesantren, mereka bolak-balik (*nglaju*) dari rumahnya sendiri. Biasanya perbedaan antara pesantren besar dan kecil dapat dilihat dari komposisi santri kalong. Semakin besar sebuah pesantren, semakin besar jumlah santri mukimnya. Dengan kata lain, pesantren kecil memiliki lebih banyak santri kalong daripada santri mukim.<sup>61</sup>

Dalam buku Ahmad Baso yang membahas mengenai sebutan “*dados santri*” (menjadi santri) muncul dalam Serat *Poerwa Tjarita Bali* yang ditulis pada tahun 1875 oleh seorang santri bernama Sasrawijaya: “*kula Raden Sasrawijaya, tiyang asal saking Ngayogyakarta, dados santri wonten pondhok ing dhusun Sepanjang, bawah kitha Malang*” (Saya Raden Sasrawijaya, asal Yogyakarta, menjadi santri di sebuah pesantren di Desa Sepanjang, di daerah kota Malang). Tulisan ini sangat menarik perhatian. Bahwa “*dados santri*” disini melampaui batas pengertian nyantri sebuah pesantren dan setelah itu selesai, menjadi alumni. “*Dados santri*” tidak

---

<sup>61</sup> Dhofier, *Tradisi...*, h. 89.

mengenal istilah alumni, tamatan atau lulusan. Ketika Sasrawijaya menyebut dirinya “*dados santri*”, itu berarti identitasnya tersebut melekat pada diri kita seumur hidup.<sup>62</sup>

Lebih lanjut Ahmad Baso berpendapat bahwa kutipan “*dados santri*” tidak terbatas kepada kalangan tertentu, tetapi juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Termasuk kalangan bangsawan atau satria. Menjadi santri, dengan demikian, tidak sekedar orang-orang yang mencari ilmu di pesantren atau yang mengamalkan dengan baik ajaran agama Islam. Lebih dari itu, menjadi santri adalah juga berarti belajar seumur hidup, dalam proses pembelajaran dan pengajaran yang tidak pernah berhenti. Bahasa Rasulullah, “*minal mahdi ilal-lahdi*”, dari ayunan hingga ke liang kubur. Menjadi santri tidak dibatasi umur. Menjadi santri juga tidak disekat oleh batas-batas agama, suku, atau kelompok.<sup>63</sup>

## 5. Pengajaran Kitab Islam Klasik

Tradisi pesantren tidak akan terlepas dari kitab-kitab Islam klasik entah warna kuning atau pun putih. Pada zaman dahulu, dalam kegiatan pengajaran kitab Islam klasik kebanyakan karangan-karangan yang menganut paham Imam syafi'i yang diajarkan kepada santri di lingkungan pesantren.

Tujuan utamanya adalah untuk mendidik calon-calon ulama. Para santri yang tinggal di pesantren dalam jangka

---

<sup>62</sup> Baso, *Pesantren...*, h. 87

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 89.

waktu pendek (misalnya kurang dari setahun) dan tidak bercita-cita menjadi ulama, bertujuan untuk mencari pengalaman dan pendalaman perasaan keagamaan. Kebiasaan semacam ini pada umumnya dijalani menjelang dan pada bulan Ramadhan. Para santri yang tinggal sementara ini mempunyai tujuan yang berbeda dengan para santri yang tinggal bertahun-tahun di Pesantren.<sup>64</sup>

Kitab bukan benda mati yang dikoleksi dan dipajang seperti obyek-obyek museum. Kitab harus dibaca, dihayati, dan diamalkan. Itulah ngaji kitab. Ngaji kitab melingkupi hakikat kehidupan manusia yang memberi warna, kepribadian dan *cultuur*-nya suatu masyarakat. Kalau Dokter Soetomo menyebut pesantren sebagai sumber mata air pengetahuan bangsa ini, maka yang dimaksud adalah proses terus menerus dalam praktik ngaji kitab ini yang membentuk “mata air” tersebut. Jadi, tidak salah kalau dalam kehidupan bangsa ini sejak kecil hingga maut menghampiri pun anak-anak bangsa ini tetap ngaji kitab. Ada tujuan mulia, visi, misi, harapan atau ideologi dibalik ngaji kitab itu, sehingga merek bersikukuh untuk tetap ngaji kitab klasik – baik sebagai santri maupun *mustami*’ (pendengar setia). Tujuan yang mulia, visi, misi dan harapan tersebut kemudian dikelola dan diramu oleh orang-

---

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 86

orang pesantren sejak dulu hingga kini, sehingga ngaji kitab bermakna tidak hanya ngaji *alif ba ta*.<sup>65</sup>

### C. Pesantren dan Potensi Pengembangan Ekonomi

Menurut Qodri Azizy, pada umumnya banyak para mubalig dan para kyai tergolong mampu dalam aktifitas perekonomian namun jarang dari mereka yang menjadikan ekonomi sebagai diskursus pengajiannya. Pengajian sering dipenuhi dengan ajaran ibadah dalam pengertiannya yang sempit pula (hanya ibadah *magdhoh*) dan diberi bunga-bunga humor yang sering lepas dari ajaran yang seharusnya dilakukan. Kalau kita kaji lebih mendalam tidak masuknya ekonomi dalam diskursus pengajian akan memunculkan pemisahan antara dunia dan agama. Dunia usaha/ekonomi adalah sekuler sedangkan pengajian adalah urusan akhirat. Dipihak lain oleh karena pengajian hanya penuh dengan ibadah murni, maka sering terjadi kesalahpahaman bahwa agama menghambat kemajuan ekonomi. Akibatnya sama yaitu perjalanan sekuler bagi umat Islam sendiri jadi kenyataan. Agama, dalam hal ini Islam belum banyak berperan sebagai etika perekonomian dan sekaligus menjadi motivasi yang mendasar untuk memperoleh kekayaan. Hal ini harus diselesaikan, sehingga umat Islam berjalan dalam landasan keagamaan termasuk urusan keagamaan, dunia usaha, perekonomian, dan semacamnya.

---

<sup>65</sup> Baso, *Pesantren...*, h. 134-135.

Dalam tataran operasional penyampaian ajaran Islam, hendaknya Islam menjadi pendorong untuk kemajuan ekonomi umat, bukan sebaliknya menjadi penghambat. Hal ini meliputi pemahaman ulang terhadap kesalahpahaman pada ajaran Islam yang sudah berjalan. Disamping itu, ajaran hukum Islam (wajib, haram, sunah, makruh dan mubah) ketika berbicara mengenai ekonomi diharapkan bukan menjadi pembelenggu atau penghambat, namun justru menjadi pemacu akan kemajuan perekonomian umat Islam.

Selanjutnya, akan lebih baik kalau jamaah pengajian lebih lagi organisasi islam juga mempunyai program operasional untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Hal ini bisa ditempuh dari perdagangan antar anggota sampai pada pengadaan pelatihan (*training*) usaha dari yang sederhana (usaha kecil) sampai pada yang lebih besar. Dari sekian banyak kegiatan, seharusnya diperlukan beberapa orang yang menangani kegiatan sebagai konsultan.

Dalam bidang ekonomi, masih ada yang harus kita lakukan baik untuk perorangan maupun untuk umat. Yaitu, pemanfaatan hasil kerja keras kita. Dalam islam jelas dan tegas bahwa pemanfaatan harta itu harus sesuai dengan ajaran islam yang ada. Kita tidak diperbolehkan beranggapan bahwa hak milik pribadi sebagai hasil kerja keras kita masing-masing itu menjadi hak penuh kita untuk memakainya, termasuk untuk kehormatan atau kehancuran. Garis besarnya adalah tidak boleh untuk

perbuatan zalim, perbuatan maksiat, dan sejenisnya. Bukan saja etika dan kerangka hukum dalam proses memperoleh, namun juga dalam memanfaatkannya.

Di samping itu semua, masih ada yang harus diperhatikan adalah manajemen yang mencakup perencanaan penggunaan harta kekayaan yang telah diperoleh, baik untuk perorangan maupun umat. Di sini ada semboyan, bukan hanya *work hard* (kerja keras) yang diperlukan, namun juga *work smart* (kerja dengan cerdas) dalam memanfaatkan hasil kerja kerasnya itu. ini meliputi kepentingan perorangan, keluarga dan umat, bahkan juga negara. Manajemen pengelolaan uang menjadi sangat penting, yang perlu dibiasakan dan diajarkan sejak dini. Sehingga bukan saja memperoleh kemanfaatan, namun juga dapat terencana, tidak akan terjadi kekeliruan penggunaan yang mengakibatkan kehabisan sebelum memperoleh yang lain.<sup>66</sup>

Indonesia pasca reformasi 1998, bila kita tidak lekas turun tangan untuk menghadapi segala persoalan dan tantangannya maka bisa saja bergerak menuju Negara yang gagal (*failed state*). Reformasi gagal karena terbajak oleh kekuatan neoliberalisme sehingga posisi ekonomi-politik nasional terseret jauh masuk ke dalam neo-imperialisme yang ganas dan mewabah. Menurut Edi Swasono, Reformasi 1998, lebih membuka jalan untuk bertekuk lutut pada *Washington*

---

<sup>66</sup> Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 104-112

*Consensus*, yang kemudian bertengger menjadi “mazhab resmi” bagi pelaksanaan kebijaksanaan liberalisasi, deregulasi, privatisasi, dan pencabutan subsidi bagi rakyat. Hal ini diperparah oleh amandemen UUD 1945 yang melucuti ideologi Negara Pancasila, atas nama globalisasi yang tak lain adalah topeng imperialisme baru.<sup>67</sup>

Krisis moneter telah meruntuhkan relasi sosial dan ekonomi masyarakat lalu memaksa masyarakat Indonesia untuk saling berebut lapangan pekerjaan karena tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga sudah tentu bahwa tuntutan hidup sejahtera merupakan tuntutan universal bagi seluruh manusia karena menyangkut kebutuhan biologis untuk menyambung hidup berupa makan, minum, berteduh, dan berpakaian. Karena itulah, ketika kebutuhan dan kesempatan mendapatkan tuntutan hidup tidak seimbang, maka yang muncul ditengah masyarakat adalah konflik sosial akibat persaingan dan frustrasi yang mengarah pada agresi.<sup>68</sup>

Persaingan merebutkan lapangan pekerjaan pada akhirnya memilih dua golongan di dalam masyarakat, masyarakat berijazah formal dan berijazah non-formal. Dari sini, kalangan pesantren mendapatkan tantangan besar karena sangat minim bisa memperoleh lapangan kerja di dalam sektor industri modern karena bekal dan kemampuan yang dimiliki hanya terbatas pada

---

<sup>67</sup> Soeprayitno, *Nasionalisme dan Kebangkitan Ekonomi*, Jakarta: INSIDE Press, 2008, h. xiii.

<sup>68</sup> Haedari (ed), *Khazanah...*, h. 181.

pemahaman dogma agama dengan sedikit kemampuan praktis lapangan kerja.<sup>69</sup>

Sejalan dengan derasnya arus perubahan sosial akibat modernisasi-industrialisasi mau tidak mau menuntut pesantren untuk memberikan reaksi atau respons secara memadai. Reaksi pesantren menghadapi perubahan yang berjalan selama ini pun beragam. Ada yang membuka dan juga memilih menutup diri. Namun, meski ada yang mendefinisikan zaman sekarang sebagai zaman edan atau *jahiliah modern*, ternyata tidak sedikit yang mencoba melakukan transformasi dengan melakukan mobilitas budaya yang menyebabkan doktrin, lembaga dan pranata sosial menjadi tetap relevan. Selain itu, pesantren juga selalu dituntut untuk melakukan *adjustment and readjustment*.<sup>70</sup> Misalnya melakukan reorientasi dengan memasukkan fungsi sosial-ekonomi ke dalam program-program pesantren.

Agar dapat menjawab tantangan zaman, pesantren perlu melakukan diversifikasi peran, yaitu tidak hanya mengembangkan aspek kognitif keilmuan, tetapi juga aspek psikomotorik keahlian kecakapan hidup. Sebetulnya, aspek pendidikan kecakapan hidup telah menjadi budaya pesantren. Hal ini dibuktikan dengan alumni-alumni pesantren yang mempunyai capaian kemandirian dalam bidang sosial ekonomi. Demikian pula bukti banyaknya kyai yang ahli ilmu keislaman sekaligus

---

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 182

<sup>70</sup> Ayzumadi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milineum Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h.108.

ahli berbisnis sebagai wirausahawan. Sayang, pengembangan keahlian kecakapan hidup ini belum menjadi ciri khas pesantren umumnya dan belum ditransformasikan kepada para santri secara kelembagaan atau keorganisasian.<sup>71</sup>

Pengembangan bidang ekonomi pesantren dimaksudkan untuk menopang kemandirian pesantren secara kelembagaan pada satu sisi dan menyiapkan kecakapan hidup pada santrinya. Kesan bahwa santri hanya pintar mengaji dan berdo'a dengan pengembangan bidang ekonomi dapat dijawab dengan bukti nyata. Kemandirian hidup dalam bidang ekonomi pada dasarnya merupakan implementasi dari ajaran agama Islam yang diajarkan oleh pesantren.<sup>72</sup>

Sejarah awal pesantren adalah sejarah kemandirian ekonomi. Belakangan ini, telah banyak pesantren membuktikan kepiawaian mereka dalam memerankan diri sebagai pelaku ekonomi. Sebagian dalam bentuk pengembangan koperasi pesantren dan mengembangkan koperasi simpan pinjam untuk membantu modal masyarakat sekitar yang terjerat kemiskinan. Ada lagi, pesantren yang mengasah *skill* kewirausahaan santri sebagai modal dalam bersaing di kehidupan nyata, selepas dari pesantren. Belum lagi sederet pesantren yang menekuni usaha agribisnis, memproduksi kebutuhan konsumsi masyarakat sekitar,

---

<sup>71</sup> L. Faurono Susilo P, *Menggerakkan Ekonomi Syariah Dari Pesantren*, Yogyakarta: FP3Y, 2007, h. 22.

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 28.

atau menawarkan jasa.<sup>73</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Ayzumardi Azra dan Nurcholish Madjid mengenai sejumlah pesantren sudah menggunakan model pendidikan keterampilan (*vocational*) yang menyatu dalam program pendidikan pesantren.

Pada masa kesulitan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia pada dekade 1950-an dan awal 1960-an pembaharuan pesantren banyak diarahkan kepada pemberian pelatihan keterampilan khususnya dalam bidang pertanian yang ditujukan sebagai bekal santri untuk menopang ekonomi pesantren. Pilihan ini sangat logis sebagai jawaban tuntutan untuk *self-supporting and self-financing*.<sup>74</sup> di antara pesantren yang aktif dalam bidang pengembangan ekonomi pada sektor pertanian yaitu Pesantren Tebuireng dan Rejoso yang melibatkan santri dalam budidaya penanaman padi, kelapa, tembakau dan kopi. Selanjutnya pesantren-pesantren besar seperti Tebuireng, Gontor, Tambak Beras, dan Tegalrejo mulai mendirikan koperasi sebagai upaya pengembangan ekonomi pesantren secara *continue* hingga sekarang.

Salah satu Pondok Pesantren yang mengembangkan Lembaga Perekonomian guna untuk menyejahterakan santri serta masyarakat luas yaitu Pondok Pesantren Giri. Di Pondok pesantren Sidogiri pada awalnya membuka usaha berupa kedai dan warung kelontong di dalam lingkungan pesantren untuk

---

<sup>73</sup> Karni, *Etos...*, h. 222.

<sup>74</sup> Susilo, *Menggerakkan...*, h. 30.

memenuhi kebutuhan para santri. Kemudian berkembang dengan menerapkan prinsip dari santri oleh santri dan untuk santri. Artinya, modal kopontren dihimpun dari santri, dikelola oleh santri, dan keuntungannya juga kembali untuk santri. Dalam perkembangannya, pada pertengahan 1997 menyelenggarakan kegiatan usaha dengan fokus simpan pinjam pola syari'ah bernama Baitul Mal wa Tamwil Maslahah Mursalal lil Ummah (BMT-MMU).<sup>75</sup>

Saat ini kopontren Sidogiri memiliki 68 cabang di beberapa wilayah Jawa Timur seperti Pasuruan, Madura, Probolinggo, Bondowoso dan Banyuwangi. Kopontren terus berupaya untuk terus melakukan inovasi dan menjadi yang terdepan dalam bisnis ritel. Berkat kemajuan ini, pada tahun 2002 Ponpes Sidogiri mendapatkan predikat sebagai Pesantren Wirausaha Pertama.<sup>76</sup>

Sayangnya, model pengembangan ekonomi yang demikian, hingga kini belum menjadi elan vital yang utama atau proses yang menyatu bagi pesantren kebanyakan. Pada umumnya, pesantren dengan ciri khas kesederhanaannya, lebih berpedoman pada prinsip "*lillahita'ala*" dalam pengertian yang sempit. Tujuan utama, pesantren adalah mendidik moralitas santri melalui pengajaran dan pendidikan keilmuan Islam. Sedangkan

---

<sup>75</sup> Sharia Accounting Expert, <http://softwarebmt.wordpress.com>, diakses pada tanggal 18 November 2016 Pukul 15:15 WIB.

<sup>76</sup> <http://www.bmtugtsidogiri.co.id/berita-146.html> diakses pada 18 November 2016 pukul 20.45 WIB.

urusan ekonomi merupakan urusan *fardhu kifayah*. Konsekuensi atas pemahaman sempit *fardhu kifayah* ini menyebabkan tidak sedikit diantara pesantren yang merasa cukup diri dengan kondisi serba sederhana dan menjauhkan dari aktivitas perekonomian. Realitas dan karena alasan-alasan itulah kiranya mengapa hanya sejumlah kecil pesantren yang memilih melakukan pengembangan ekonomi pesantren sebagai bagian dari proses pendidikan dan pengajaran pesantren.<sup>77</sup> Sehingga pemahaman yang keliru perlu diluruskan agar pesantren dapat memainkan peranannya sebagai *agent of social* dan menjadi pelopor pembangunan ekonomi umat di Indonesia.

Salah satu pengantar pesantren dalam kemandirian ekonomi ialah memaksimalkan potensi yang ada dalamnya. Karena pesantren merupakan lembaga swasta yang identik dengan kemandirian yang menjadi ciri khasnya. Keberhasilan pesantren dalam upaya kemandirian ekonomi menjadi daya tarik masyarakat untuk mengirim anak-anaknya ke pesantren tersebut. Kemandirian ekonomi pesantren pada gilirannya akan membuat pesantren menjadi independen dan tidak terpengaruh oleh penguasa dan kapitalis. Selain itu, keberhasilan ini akan berdampak pada biaya pendidikan yang murah dengan kualitas pendidikan yang baik akan membantu masyarakat sekitar dalam menghadapi problem komersialisasi pendidikan yang sedang mewabah.

---

<sup>77</sup> *Ibid*, h. 31.

Selain sebagai lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren juga memiliki Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) yang didirikan agar pesantren mandiri dalam bidang ekonomi. Badan Usaha Milik Pesantren adalah bidang yang membawahi semua unit-unit usaha ekonomi, dan bertanggung jawab kepada pengurus harian atau pengasuh pondok pesantren.<sup>78</sup> Badan Usaha Milik Pesantren mengacu pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa : Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, menerapkan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

#### **D. Sekilas Mengenai BPRS**

Lembaga keuangan adalah sebuah wadah di mana terdapat jasa dalam proses mengelola keuangan untuk tujuan tertentu. Seperti yang kita tahu, peranan lembaga keuangan dalam kehidupan terutama bank sangatlah penting. Hal ini akibat semakin berkembangnya sistem ketataniagaan yang mau tidak mau melibatkan lembaga keuangan atau bank di dalamnya. Namun pesatnya perkembangan bank tidak diimbangi dengan

---

<sup>78</sup> <http://bumps3.com/page/profil.htm>. di akses pada tanggal 18 November 2016 pukul 13:48 WIB.

pesatnya kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang tergolong ekonomi lemah yang biasanya terdapat di wilayah desa atau kecamatan. Pada umumnya bank konvensional sangat selektif dan hanya berorientasi untuk mendapat keuntungan dengan sedikit resiko, oleh karenanya masyarakat ekonomi lemah sulit untuk mendapat jasa keuangan bank.

Dalam upayanya untuk merangkul masyarakat ekonomi lemah, pemerintah juga mengatur untuk didirikannya Bank Perkreditan Rakyat yang lingkup kerjanya lebih terpusat pada wilayah tertentu saja, misalnya di kabupaten, kecamatan dan desa. Hal ini bertujuan agar semakin meratanya layanan jasa keuangan bagi seluruh masyarakat. Praktek bunga yang diterapkan setiap bank, baik bank umum ataupun bank perkreditan rakyat tetap menjadi andalan dalam rangka mencari keuntungan. Sistem bunga yang diterapkan bank akhirnya mendapat respon dari kaum muslim, yang mana sudah jelas bahwa bunga/riba adalah haram hukumnya. Maka dengan munculnya pemikiran untuk mendirikan bank yang berprinsip syariah secara nasional terlebih dahulu didirikan sebuah lembaga keuangan yaitu bank perkreditan rakyat syariah pada tahun 1990. Diharapkan bahwa berdirinya bank perkreditan rakyat syariah menjadi salah satu solusi dalam rangka melayani jasa keuangan

yang bebas dari praktek riba sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.<sup>79</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang perlu diperhatikan adalah kepanjangan dari BPRS yang berupa Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Semua peraturan perundang-undangan yang menyebut BPRS dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>80</sup>

Menurut Warkum Sumitro, berdirinya BPRS di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari BPR-BPR pada umumnya. BPR yang status hukumnya disahkan melalui Paket Kebijakan Keuangan Moneter dan Perbankan (PAKTO tanggal 27 Oktober 1998 pada hakikatnya merupakan modifikasi (model baru) dari Lumbung Desa dan Bank Desa yang ada sejak 1980-an.<sup>81</sup>

Lumbung desa sebagai sistem perkreditan rakyat zaman dahulu, dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat tani di pedesaan, karena pada waktu itu peredaran uang belum menjangkau masyarakat tani di pedesaan sehingga pinjaman

---

<sup>79</sup> Norlaila Hayati, <http://lailahamkha.blogspot.co.id/2013/11/bank-pembiayaan-rakyat-syariah-bprs.html>, diakses pada tanggal 24 November 2015 pukul 21:57 WIB

<sup>80</sup> Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h.7

<sup>81</sup> M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, (Banjarasin: Antasari Press, 2006), h. 88

dalam bentuk padi lebih menguntungkan dan lebih praktis daripada pinjaman dalam bentuk uang. Selain itu pinjaman padi tidak mengganggu kestabilan harga padi yang menjadi penghasilan utama masyarakat desa.<sup>82</sup>

Karena struktur ekonomi, sosial dan administrasi masyarakat desa sudah banyak mengalami perubahan sebagai akibat dari proses pembangunan, maka keberadaan BPR tidak lagi persis sama seperti lumbung desa zaman dahulu. Namun demikian, paling tidak keberadaan BPR pada masa sekarang dan yang akan datang diharapkan mampu menjadi alternatif pengganti yang terbaik bagi fungsi dan peranan lumbung desa dan Bank Desa dalam melindungi petani dari gejolak harga padi dan resiko kegagalan dalam produksi serta ketergantungan petani terhadap para rentenir.<sup>83</sup>

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang merubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan nampak lebih jelas dan tegas mengenai status perbankan syariah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 huruf C yang berbunyi sebagai berikut; “menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Seiring dengan bergulirnya

---

<sup>82</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 125

<sup>83</sup> Ibid, h. 126

sistem ekonomi Islam sebagai sistem alternatif dalam mengelola perekonomian, maka kehadiran BPRS juga sangat diharapkan.<sup>84</sup>

Keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/Kep/Dir, tertanggal 12 Mei 1999 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>85</sup>

Tujuan pendirian BPRS antara lain:<sup>86</sup>

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
- b. Mengurangi urbanisasi.
- c. Menambah lapangan kerja, terutama di kecamatan-kecamatan.
- d. Meningkatkan pendapatan perkapita.
- e. Membina semangat ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi.
- f. Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan.
- g. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan.

---

<sup>84</sup> Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 40

<sup>85</sup> M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), h.89

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 43-44

- h. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana.
- i. Menampung dan menghimpun tabungan masyarakat. Dengan demikian BPRS dapat turut memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut mendidik rakyat dalam berhemat dan menabung; dengan menyediakan tempat yang dekat, aman dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil.

BPR Syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang bisnis jasa keuangan yang tentunya memiliki tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun panjang. Tujuan jangka pendek adalah memperoleh laba. Sedangkan tujuan jangka panjangnya yakni menjaga keberlangsungan usaha. Dalam mencapai tujuan yang manajemen harus bekerja keras dalam pengelolaannya. BPR Syariah sebagai lembaga keuangan harus menjaga kepercayaan nasabah. Agar amanah BPR Syariah harus menjaga tingkat kesehatan perusahaan. Tingkat kesehatan BPR Syariah dapat diwujudkan dengan kinerja dan kualitas yang memperhatikan aspek tujuan jangka panjang dan pendek. BPRS yang sehat adalah BPRS dengan ketentuan berikut yakni, pertama, aman, karena dananya aman, punya legalitas hukum, sistem kelembagaan dan manajemen yang baik, pengendalian internal yang baik. Kedua, dipercaya karena pengelolaannya mempunyai keahlian dan integritas tinggi. Ketiga, bermanfaat

karena saling menguntungkan antara BPR Syariah dan masyarakat sekitar.<sup>87</sup>

Cara yang ditempuh untuk mengukur kesehatan bank sangat beragam, diantaranya dengan menganalisis *capital, asset, management, earning* dan *liquidity* atau yang sering disebut CAMEL. Analisis ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pengelolaan manajemen sebuah BPRS, apakah dalam pengelolaan manajemen sesuai dengan asas-asas bank yang berlaku.

---

<sup>87</sup> Moh. Sochih, Analisis Kesehatan Bank ditinjau dari Analisis CAMEL untuk mengukur keberhasilan Manajemen pada PT BPRS. Margirizki, Bangun Tapan, Bantul, Yogyakarta dalam Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, VI, No.2, 2008, h. 84.